

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA BILATERAL DENGAN JEPANG STUDI KASUS: INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)

Yusron Avivi¹ & Muhnizar Siagian²

¹Universitas Sebelas Maret
yusron.avivi@student.uns.ac.id

²Universitas Sebelas Maret
muhnizar.siagian@staff.uns.ac.id

Doi: 10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967

Abstract

The Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is a bilateral cooperation in the economic sector between Indonesia and Japan that is expected to support economic growth between the two countries through various established schemes. In foreign policy studies, each country has an interest to be achieved in a variety of bilateral cooperation undertaken. Indonesia has many national interests in this bilateral economic cooperation. And also the various factors behind Indonesia to pursue economic diplomacy through bilateral economic cooperation agreements with Japan. This study aims to look at Indonesia's national interests in IJEPA cooperation and how Indonesia is trying to achieve these various interests. This study uses a qualitative case study method with descriptive analytical methods. Researchers used a foreign policy approach with various concepts of national interest in bilateral cooperation in the economic field.

Keywords: Foreign Policy, National Interest, Bilateral Cooperation.

Abstrak

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan kerja sama bilateral pada sektor ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi kedua negara melalui berbagai skema yang telah ditetapkan. Dalam studi kebijakan luar negeri, setiap negara mempunyai kepentingan yang ingin dicapai dalam berbagai kerja sama bilateral yang dijalankan. Indonesia memiliki banyak kepentingan nasional dalam kerjasama ekonomi bilateral ini. Dan juga berbagai factor yang melatar belakangi Indonesia menempuh jalur diplomasi ekonomi melalui perjanjian kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama IJEPA dan bagaimana Indonesia mencoba untuk mencapai berbagai kepentingan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan deskriptif analitis. Peneliti menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dengan berbagai konsep kepentingan nasional dalam kerja sama bilateral di bidang ekonomi.

Kata kunci : Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Kerja Sama Bilateral.

I. Pendahuluan

Dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional, negara akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat mensejahterakan rakyatnya. Berbagai cara pasti dilakukan agar kepentingan nasional sebuah negara dapat terpenuhi, termasuk dengan bantuan negara lain. Negara tidak dapat berdiri sendiri dengan hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki tanpa bantuan dari negara lain. Kerja sama bilateral dinilai sebagai kerja sama yang saling menguntungkan dan efektif. Indonesia sebagai negara yang berdaulat berhak untuk melaksanakan kerja sama dengan negara lain. Sampai dengan April 2019, telah terjalin 162 hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Wilayah ini dibagi menjadi delapan wilayah, yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Jepang merupakan satu dari negara-negara maju di benua Asia, sangat diperhitungkan untuk menjalin kerja sama dan hubungan baik dalam bidang apapun. Hal ini mendorong Indonesia memperhitungkan Jepang untuk menjalin mitra penting dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional Indonesia. Kesepakatan untuk melakukan kerja sama ekonomi bilateral yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan negara Jepang, kerja sama tersebut disingkat IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) yang disepakati pada 20 Agustus 2007. Perjanjian tersebut mencapai kesepakatan tentang kerja sama ekonomi antara kedua negara dalam perdagangan

barang dan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, dan juga energi dan sumber daya mineral. Jepang juga merupakan tujuan terbesar kedua untuk ekspor nonmigas Indonesia setelah China.

Perjanjian IJEPA memiliki tiga prinsip utama yaitu liberalisasi, fasilitasi, serta peningkatan kapasitas. Liberalisasi disini berkenaan dengan upaya Indonesia dan Jepang untuk mengikis hambatan yang ada antar kedua negara dalam menjalankan perdagangan maupun investasi. Fasilitasi bermanfaat untuk menyediakan fasilitas antar negara dalam melakukan kerja sama seperti dalam hal standarisasi, bea masuk, pelabuhan, dan juga perbaikan iklim investasi. Peningkatan kapasitas berusaha memberikan peluang bagi produsen dari Indonesia untuk menaikkan daya saing produknya. Dijalannya kerja sama ekonomi bilateral ekonomi untuk pertama kalinya bagi Indonesia dan memilih Jepang sebagai partnernya tidak lain karena Jepang telah menjalin hubungan dagang sejak lama serta Jepang merupakan salah satu yang terbesar dalam melakukan investasi di Indonesia.

Hubungan perekonomian antar dua negara ini dinilai saling melengkapi atau komplementer. Contohnya Jepang mengekspor ke Indonesia berupa produk-produk otomotif yang sudah siap pakai, sementara Indonesia mengekspor ke Jepang bahan-bahan mentah seperti biji besi agar selanjutnya dapat diolah oleh Jepang. IJEPA memberikan keleluasaan kedua negara untuk melakukan kerja sama membangun perekonomian kedua negara dan mengurangi hambatan-hambatan dengan adanya hak-hak khusus pada kesepakatan yang dapat memperlancar berbagai aktivitas ekonomi. Perjanjian kerja sama ekonomi IJEPA baru mulai

berlaku efektif mulai 1 Juli 2008 dan tiap lima tahun akan dilakukan peninjauan ulang. Untuk memperlancar pemberlakuan kesepakatan ini maka dibentuk juga komite bersama yang mana tersusun dari wakil pemerintah masing-masing yang nantinya bertugas untuk melakukan *review* dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan operasional jalannya kerja sama. Berdasarkan uraian latar belakang pertanyaan yang diajukan, penulis merumuskan pernyataan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu “Apa saja kepentingan nasional Indonesia dalam menjalin kerja sama bilateral dengan Jepang melalui *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA)?”

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka dari beberapa sumber literatur dan penelitian terdahulu yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Literatur pertama yaitu Jurnal dari Sigit Setiawan, peneliti pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dengan judul “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang” pada tahun 2012 yang termuat dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis. Jurnal ini membahas mengenai peningkatan pendapatan nasional yang berasal dari pertumbuhan nilai ekspor Indonesia melalui IJEPA. IJEPA membantu menggerakkan perekonomian yang mendorong negara Indonesia dan Jepang untuk melakukan spesialisasi produk yang menjadi keunggulan ekspor tertinggi dan mengimpor produk dengan keunggulan yang rendah. Dengan itu, akan terjadi peningkatan pendapatan nasional jangka panjang pada tingkat mikro dikarenakan pembukaan akses pasar yang lebih luas dan level kompetisi antar pelaku pasar

dari kedua negara akan meningkat tajam. Pada tingkat makro terjadi persaingan antar negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan menaikkan daya saing antar keduanya. Dengan adanya kerja sama untuk membuka akses pasar domestik di kedua negara ini menyebabkan bidang ekspor dan impor semakin meningkat dan meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing. Pemberlakuan *Free Trade Area* akan mempermudah Jepang melakukan ekspansi dalam perekonomian Indonesia. Dan untuk Indonesia, IJEPA secara langsung berdampak pada investasi asing dan memperlancar kegiatan ekspor ke Jepang.

Penulis memaparkan bahwa untuk mengoptimalkan kerja sama ini diperlukan beberapa hal antara lain memperkuat sistem pendukung IJEPA, memperbaiki administrasi dalam peraturan asal barang, meningkatkan cakupan dalam sektor agribisnis, meningkatkan kesepakatan agar bersifat WTO plus, serta perlunya partisipasi dari negara lain di Asia yang mendukung perluasan FTA di kawasan Asia. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Jepang maupun Indonesia dalam menerapkan IJEPA sesuai standar aturan dari WTO. Dengan kepatuhan yang dilaksanakan, maka akan menimbulkan dampak positif terhadap perdagangan domestik bilateral antar negara bahkan perdagangan dunia.

Literatur kedua yaitu Jurnal dari Syamsul Hadi, dengan judul “Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective” pada tahun 2014 yang termuat dalam East Asian Policy-World Scientific. Jurnal ini membahas upaya kedua negara dalam rangka mewujudkan kerja sama perdagangan bebas ini. Peran pemerintah Indonesia sangat penting dalam

mewujudkan tercapainya kepentingan nasional dalam kerja sama ini. Penulis menyampaikan bahwa liberalisasi ekonomi *Economic Partnership Agreement* sebagai model baru dari *Free Trade Area* dan juga *World Trade Organization-plus* yang diterapkan dalam kerja sama Indonesia-Jepang. Pada bidang industri, Indonesia ditekan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk menjadi basis industri manufaktur untuk pasar Jepang. Kompensasi yang diberikan Jepang adalah MIDEK yang bertujuan membantu industri manufaktur Indonesia untuk mendapat kapasitas agar memenuhi standar internasional dan meningkatkan daya saing produk manufaktur Indonesia di dunia.

MIDEK merupakan sebuah kesepakatan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah menyepakati skema pengurangan tarif USDFS. Dengan adanya MIDEK-IJEPA diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dalam teknologi manufaktur dan peluang pengembangan industri manufaktur di Indonesia dalam lima tahun pelaksanaan program ini. Namun durasi MIDEK dinilai terlalu singkat dan kompleks karena tidak ada tahap perluasan basis produksi. Promosi yang dilakukan juga kurang memadai dan terjadi perbedaan sistem penganggaran nasional dari kedua negara. Kerja sama ini dikatakan mampu untuk mengembangkan industri manufaktur Indonesia untuk masuk ke pasar Jepang. Melalui skema MIDEK yang diantaranya terdapat berbagai program seperti *basic study, training for trainer and trainee, and technology*, seharusnya industri Indonesia dapat menciptakan peningkatan yang signifikan agar dapat bersaing di pasar global.

Literatur ketiga yaitu Jurnal dari Levi Gocklas C.S. dan Sri Sulasmiyati, dengan judul “Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi pada Badan Pusat Statistik Periode 2000-2016)” pada tahun 2017 yang termuat dalam Jurnal Administrasi Bisnis. Jurnal ini membahas mengenai perkembangan nilai ekspor dan impor Indonesia. Sebelum adanya IJEPA, kisaran angka ekspor Indonesia berada pada USD 1.436.285.345,55 dengan *standard deviation* sebesar 418148762,89. Setelah diterapkannya IJEPA, angka ekspor Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan sebesar USD 2.016.309.412,94 dengan nilai *standard deviation* 534619423,02. Angka impor Indonesia sebelum penerapan IJEPA sebesar USD 491.115.253,29 dengan *standard deviation* sebesar 192.507.764,09 dan setelah diterapkannya IJEPA nilainya mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 1.365.586.690,01 dengan *standard deviation* 362.798.814,72. Meningkatnya nilai ekspor dan impor Indonesia membuat investor akan melirik pasar Indonesia untuk menanamkan modalnya.

Dengan adanya kesepakatan kerja sama IJEPA ini, Indonesia berkesempatan untuk berada sejajar dengan negara-negara lain yang berada di persaingan pasar Jepang terutama negara lain yang sebelumnya sudah memiliki kesepakatan bebas dagang dengan Jepang. USDFS yang menjadi salah satu skema dalam kerja sama ini dimana pemberian tarif khusus untuk perusahaan Jepang yang memiliki badan hukum di Indonesia. Investor akan berbondong-bondong untuk berinvestasi di Indonesia dan mendirikan perusahaan disini karena tarif ekspor yang ringan

dan dekat dengan sumber bahan baku industri. Keuntungan-keuntungan dari adanya investasi asing membuat negara-negara berusaha menciptakan daya tarik untuk investor asing sebanyak-banyaknya. Investor asing berbeda dengan hutang luar negeri, karena investor tidak membawa beban di kemudian hari bagi negaranya. Banyak negara berkembang yang harus melakukan penyesuaian kebijakan dan hukum di negaranya serta menjaga kestabilan kondisi politik-ekonominya, sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modal.

II. Metode Penelitian

Dalam lapangan studi Hubungan Internasional, kerja sama baik bilateral maupun multilateral, elemen terpenting untuk dianalisis adalah kepentingan nasional. Berbagai strategi dijalankan oleh negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya, salah satunya dengan mengadakan kerja sama bilateral. Meski kajian mengenai kepentingan nasional merupakan tradisi klasik dalam lapangan studi hubungan internasional, kajian ini tetap menarik dan terus berkembang sesuai dengan berbagai fenomena kerja sama dan konflik antar negara dalam pergaulan dunia. Penulis menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan deskriptif analitis untuk melakukan penelitian ini dan menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dengan konsep kepentingan nasional dalam kerja sama ekonomi bilateral.

Pencetus teori mengenai kepentingan nasional yang pertama yaitu Hans J Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai alat untuk mengejar kekuasaan, karena satu negara dapat mengendalikan negara lain melalui kekuatan itu. Lebih tepatnya, konsep *national interest* adalah kemampuan

suatu negara untuk melindungi dan melestarikan fitur material, politik dan budaya yang bebas dari campur tangan negara lain. (Morgenthau, 1978). Felix E. Oppenheim (Oppenheim, 1987) mendefinisikan konsep kepentingan nasional sebagai tujuan kesejahteraan pemerintah nasional dalam lingkup internasional. Ini menunjukkan kepentingan nasional suatu negara akan mempertahankan otonomi politik dan integrasi nasionalnya untuk menjaga kesejahteraan rakyatnya di panggung internasional. Menurut Teuku May Rudy (2002:116) *national interest* merupakan *goals* yang harus dicapai dalam kaitannya dengan kebutuhan bangsa serta cita-cita nasional. Kepentingan nasional yang cenderung tetap serta identik di berbagai negara maupun wilayah adalah kesejahteraan rakyat (termasuk kelangsungan hidup rakyat juga keperluan daerah) dan keamanan. Dua masalah utama ini harus ada, yaitu kesejahteraan (*prosperity*) dan keamanan (*security*) yang merupakan dasar untuk merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional untuk masing-masing negara. Untuk Indonesia, kepentingan nasional secara umum telah dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat; "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,..."

Morgenthau juga menjelaskan bahwa konsep kepentingan nasional memiliki dua faktor. Yang pertama adalah sesuatu yang dituntut secara nasional karena sangat dibutuhkan dan yang kedua yaitu sesuatu yang dapat diubah serta diputuskan oleh situasi.

Kepentingan nasional setiap negara adalah berbeda dan dapat berubah sesuai dengan masa. Ditegaskan pula oleh Martha Finnemore dan Jutta Weldes bahwa keadaan dan peran yang berbeda dalam sistem internasional sehingga kepentingan nasional tiap negara pun berbeda-beda.

Kepentingan nasional bersifat subjektif, tergantung dengan arah kebijakan negara tersebut, terlebih mengenai kebijakan luar negeri suatu negara. Maka kepentingan nasional dapat pula disesuaikan oleh aktor-aktor yang berperan dalam pemerintahan. Jadi kepentingan nasional bukan hanya kepentingan banyak orang, namun bisa jadi merupakan kepentingan beberapa orang yang ditujukan sebagai kepentingan bersama. Perihal mengenai kepentingan nasional, negara mengambil peran aktif sebagai aktor dalam pengambilan keputusan serta mewakili masyarakatnya untuk melakukan interaksi dengan dunia internasional.

Pada saat ini kepentingan nasional membawa negara kepada sebuah hubungan baik yang dinamakan kerja sama. Perubahan yang terjadi setelah perang berakhir merubah konflik menjadi kebutuhan akan kerja sama demi mewujudkan kepentingan nasional setiap negara. Negara berperan dalam menciptakan keadaan yang aman bagi rakyatnya, dengan berusaha mewujudkan kepentingan nasionalnya. Munculnya kepentingan nasional ini menunjukkan berbagai aspek telah menjadi sebuah identitas nasional. Tergantung pada identitas yang dibuat, adalah mungkin untuk menetapkan tujuan untuk waktu dekat, tujuan sementara atau tujuan keberlanjutan jangka panjang. Apakah identitas itu sangat penting atau tidak, itu juga terkait dengan pentingnya identitas.

Dalam hal kerja sama Bilateral Indonesia – Jepang, teori mengenai kepentingan nasional digunakan dalam analisa kepentingan Indonesia dalam kerja sama dalam *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Teori ini digunakan sebagai sudut pandang untuk melihat kepentingan nasional Negara Indonesia dalam sektor ekonomi. Sehingga dapat diketahui mengapa Indonesia perlu mencari aspek pemenuhan kepentingan nasional hingga sampai luar batas negara. Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas kerja sama antara Indonesia-Jepang untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing terkait perluasan kerja sama ekonomi.

Koesnadi Kartasasmita mengatakan di bukunya "Organisasi dan Administrasi Internasional" bahwa kerja sama internasional dipahami sebagai "karena saling ketergantungan masyarakat dalam lingkup internasional dan hubungan antarpribadi yang semakin kompleks, diperlukan kerja sama dalam komunitas internasional. Alasan untuk menjalin kerja sama internasional adalah adanya *national understanding* dan kesamaan tujuan, didukung dengan iklim internasional yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kerja sama didasarkan pada kepentingan bersama antar negara, tetapi kepentingannya tidak sama. Kerja sama internasional berdampak pada berbagai negara dan kepentingan nasional negara yang tidak dapat diwujudkan oleh negara. Kerja sama internasional merupakan sudut pandang yang lain dari konflik internasional dan aspek hubungan internasional. Masalah utama kerja sama internasional didasarkan pada konsep sejauh mana kepentingan bersama yang diperoleh melalui kerja sama tersebut dapat mendukung kepentingan

kompetitif secara sepihak. Kerja sama internasional terbentuk dalam kehidupan internasional yang meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan, pertahanan nasional, dan keamanan.

Kerja sama internasional adalah kerja sama antar negara untuk menjalin sebuah hubungan antar negara. Bentuk kerja sama dan interaksi dapat dibedakan menurut pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan antara kedua negara, seperti kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral. Dan dalam penelitian ini, penulis fokus membahas kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral adalah kerja sama yang terjalin hanya antara dua negara. Hubungan bilateral adalah kondisi yang menggambarkan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua pihak yang terlibat, dan pelaksana utama hubungan bilateral adalah negara. Upaya untuk melakukan kerja sama bilateral dapat dilakukan di berbagai bidang. Salah satu bidang kerja sama yang akan dibahas dalam artikel ini adalah dalam bidang ekonomi. Saat ini, banyak negara bekerja sama di bidang ekonomi. Selain manfaat timbal balik, kerja sama ekonomi juga sangat efektif dalam implementasinya. Sifat kooperatif dari setiap negara yang bersifat universal untuk menciptakan situasi yang dapat menghindari berbagai masalah dan konflik internasional.

Dalam era modernisasi dan globalisasi, suatu negara tidak dapat beroperasi sendiri, tertutup, atau hanya mengandalkan potensinya. Betapa hebatnya kekuatan dan potensi suatu negara, jika tidak bekerja sama dengan negara lain, ia masih belum bisa berkembang dan maju. Potensi yang dimiliki didistribusikan di negara lain, sedangkan potensi yang tidak dimiliki diimpor dari negara lain. Mengingat hal

ini, negara-negara maju perlu bekerja sama dengan negara-negara berkembang, dan yang lebih enting, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, perlu melakukan kerja sama yang mendalam dan komprehensif untuk mempromosikan semua bidang di kedua negara, termasuk bidang sosial ekonomi. Dalam studi ini, tujuan kerja sama ekonomi bilateral adalah untuk meningkatkan ekonomi kedua negara. Terutama dibahas mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam kerja sama ekonomi bilateral dengan Jepang dalam Kemitraan Perjanjian Ekonomi Indonesia-Jepang. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA).

III. Hasil dan Pembahasan

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) sebagai perjanjian bilateral di bidang ekonomi Indonesia-Jepang bertujuan meningkatkan impor, ekspor serta investasi di kedua negara. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menciptakan keuntungan yang adil dan seimbang bagi kedua negara dengan metode liberalisasi pasar, fasilitasi, dan kerja sama pengembangan kapasitas yang ditetapkan sebagai bidang prioritas. Tujuan penerapan IJEPA adalah untuk memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang, terlebih dalam perdagangan dan investasi. Tujuan dari kerjasama IJEPA menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri adalah memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia-Jepang. Termasuk dalam kerja sama mengenai pengembangan kapasitas, liberalisasi, meningkatkan perdagangan dan investasi, guna meningkatkan aliran barang lintas batas,

investasi dan jasa, tenaga kerja dan perdagangan.

Karena kondisi ekonomi kedua negara ini saling melengkapi dengan perjanjian perdagangan bebas bilateral, kedua belah pihak sepakat bahwa kerangka tujuan kerjasama ini adalah pertama, untuk liberalisasi perdagangan barang dan jasa antara kedua negara. Dan kedua, untuk meningkatkan dengan memperkuat kegiatan perlindungan dan investasi kedua negara. Ketiga, untuk memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Keempat, untuk meningkatkan transparansi dan menciptakan pemerintahan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kelima, untuk promosi dengan meningkatkan kegiatan anti-persaingan dan kerja sama. Keenam, untuk memperdalam kerangka dalam kerja sama dan yang ketujuh, menetapkan prosedur yang efektif untuk menegakkan perjanjian dan menyelesaikan perselisihan.

Kepentingan nasional masing-masing negaralah yang melandasi terjalannya kerja sama ini. Kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama IJEPA dimana Jepang merupakan menjadi mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia. Karenanya, inilah yang menjadi peluang untuk Indonesia dapat mengoptimalkan kerja sama ekonomi ini. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jepang adalah pangsa pasar terbesar bagi produk Indonesia, menyumbang 20% dari total ekspor Indonesia, sedangkan Jepang adalah sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia, menyumbang 13%. Kerja sama IJEPA diharapkan akan meningkatkan volume impor dan ekspor antara Indonesia-Jepang. Indonesia berpeluang untuk mengirim pekerja

semi-terampil ke Jepang. Hingga saat ini, Jepang telah merekrut pekerja Indonesia di bidang farmasi, keperawatan, otomotif, dan tenaga kerja.

IJEPA memberikan kepastian yang lebih besar terhadap akses pasar, menempatkan Indonesia pada tingkat yang sama dengan negara lain yang sama telah mencapai kesepakatan dengan Jepang. Dengan diberlakukannya penurunan tarif bea masuk, Indonesia memiliki peluang yang sama untuk bersaing dengan negara-negara yang juga telah menjalin kerjasama ekonomi dengan Jepang baik secara bilateral maupun multilateral. Dengan keringanan tarif sudah memperjelas secara preferensi dapat mendorong keunggulan produk dari Indonesia di Pasar Jepang. Produk unggulan dari Indonesia dapat dengan mudah untuk masuk ke pasar Jepang dan menyaingi produk dari negara mitra Jepang yang lain. Melalui pengoperasian IJEPA, Indonesia akan berusaha untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga meningkatkan PDB negara.

Indonesia dan Jepang dapat lebih mengeksplorasi potensi mewujudkan manfaat mereka untuk memasukkannya dalam IJEPA. Indonesia dapat mempercepat laju sirkulasi barang dan jasa ke Jepang. Kenaikan impor dan ekspor dapat meningkatkan devisa negara, yang pada akhirnya meningkatkan PDB negara. Promotor ekonomi sebagian besar didukung oleh industri. Dengan adanya perjanjian IJEPA ini telah menjadi batu loncatan bagi UKM (Usaha Kecil Menengah) Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, Indonesia akan mendapat manfaat dari peningkatan investasi Jepang. Ini juga akan mempromosikan bisnis dalam negeri untuk lebih dikenal oleh investor dari

Jepang maupun mitra yang lain yang terpengaruhi karena investasi yang dilakukan Jepang.

Mendapatkan transfer teknologi juga merupakan keuntungan bagi Indonesia. Melalui transfer teknologi ini, Indonesia dapat meningkatkan mutu dari sumber daya manusia dan kapasitas negara Indonesia. Peningkatan kapasitas tersebut termasuk standardisasi dan pengujian produk, standar kebersihan produk makanan dan minuman, keterampilan sektor manufaktur dan pelatihan teknis, yang juga meningkatkan kualitas produk dari Indonesia yang beredar di pasar domestik maupun pasar internasional. Dalam bidang otomotif, Indonesia memiliki kepentingan untuk membuat kemandirian teknologi oleh tawaran Jepang dalam program MIDEC (Manufacturing Industry Development Center). Impian Indonesia melalui skema MIDEC merupakan sebuah usaha Indonesia untuk mandiri dalam teknologi agar dapat mengembalikan proyek mobil nasional yang telah lama diinginkan.

Dalam kerjasama bilateral IJEPA, Indonesia mengadopsi strategi kepentingan nasional (Atmawinata, Irianto, Diawati dan Adlir, 2008: 2-3): 1) Dalam sektor penggerak Indonesia-Jepang sepakat bahwa industri otomotif, listrik, elektronik dan Alat berat merupakan kekuatan pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi di negaranya masing-masing; 2) Program Kesejahteraan bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pasar Jepang kearah yang lebih luas hingga ke produk-produk berkualitas tinggi milik Indonesia, menaikkan ekspor ke berbagai negara asing, meningkatkan daya saing industri manufaktur dan harapan Indonesia untuk menjadi

Produsen untuk meningkatkan basis daya beli masyarakat Indonesia dan menghasilkan produk manufaktur bernilai tambah sehingga dapat diekspor dengan harga yang bersaing. dan 3) Menjadi pusat pengembangan manufaktur - berharap bahwa manufaktur akan berfungsi sebagai kekuatan pendorong dalam pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan daya saing.

Dalam pembahasan *General Review* IJEPA yang seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun namun ternyata harus mundur karena Jepang mensyaratkan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang dianggap Jepang tidak sesuai komitmen Indonesia dalam IJEPA, namun klaim ini hanyalah sepihak dinyatakan oleh Jepang dan sangat merugikan bagi Indonesia. Karena kenyataannya Indonesia telah menawarkan kepada Jepang untuk memberikan masukan saat perumusan PMK sebelum diterbitkan. Indonesia berkepentingan untuk membebani Jepang dengan kategori R-1 dan R-4 (renegosiasi). Kategori R-1 merupakan kode dari tarif bea masuk yang rencananya akan dinegosiasi ulang bersama dalam tinjauan umum. Kategori R-4 merupakan tarif impor yang rencananya dinegosiasi ulang pada tahun keempat setelah negosiasi. Kategori R-1 dan R-4 adalah kewajiban Jepang di IJEPA yang belum terlaksanakan secara efektif. Selain perihal kepentingan, Indonesia juga tidak memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, sehingga eksploitasi terus berlanjut. Diplomasi ekonomi terus diupayakan agar tercapainya apa yang telah menjadi kepentingan Indonesia dalam menjalin kerjasama ini.

Peran penting diplomasi ekonomi adalah berfungsi sebagai alat dalam hubungan internasional terkait dengan kebijakan luar negeri. Jika pemerintah dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan dan strategi kebijakan politik luar negeri untuk melihat potensi negara lain, maka ia akan memainkan peran yang baik. Diplomasi ekonomi Indonesia dengan Jepang pada dasarnya didorong oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah Indonesia yang sudah percaya terhadap Jepang sebagai teman tradisional Indonesia. Hubungan perdagangan yang saling menguntungkan karena Indonesia kaya akan sumber daya alam sementara Jepang menguasai teknologi dan pasar sehingga saling membutuhkan antara Indonesia dengan Jepang. Serta ekonomi Jepang yang sudah tidak diragukan lagi laju perkembangannya. Ekonomi Indonesia juga tergantung pada situasi ekonomi Jepang karena berfokus pada diplomasi ekonomi dalam bentuk impor, ekspor, dan investasi. Nilai perdagangan bilateral kedua negara pada 2019 naik menjadi 31,5 miliar dolar. Jepang salah tujuan favorit ekspor Indonesia. Sehingga bukanlah sebuah langkah yang salah jika memperjuangkan diplomasi ekonomi dengan Jepang. Meskipun IJEPA adalah kemitraan ekonomi, diharapkan kerja sama ini dapat memberikan keuntungan baik bagi Indonesia maupun Jepang. Kerja sama ini diharapkan akan terus meningkatkan pembangunan ekonomi kedua negara.

IV. Kesimpulan

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan bentuk kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan impor, ekspor dan investasi di

kedua negara. Kerangka perjanjian ini meliputi liberalisasi perdagangan, investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, transparansi, anti-persaingan, memperdalam kerja sama, dan menetapkan prosedur untuk menegakkan perjanjian. Perjanjian ini terjalin dilandasi oleh kepentingan nasional masing-masing negara. Adapun kepentingan nasional Indonesia dalam perjanjian ini antara lain mengoptimalkan kerjasama antara Indonesia-Jepang, mendapat kepastian akses pasar di Jepang yang lebih luas berkat penurunan tarif, meningkatkan arus barang dan jasa, mendapatkan transfer teknologi, sebagai sektor penggerak, program kesejahteraan, dan juga menjadi pusat pengembangan manufaktur.

General Review semestinya diadakan lima tahun setelah dilaksanakannya perjanjian. namun Jepang menunda pelaksanaan kegiatan ini sampai diubahnya Peraturan Menteri Keuangan yang diklaim tidak sesuai dengan IJEPA. Padahal sebelumnya Indonesia sudah menawarkan Jepang agar memberi usulan terkait peraturan ini sebelum diterbitkan. Indonesia masih mengejar kepentingannya untuk memenuhi perundingan ulang terkait tarif bea masuk dan tarif impor yang belum terlaksana secara efektif. Selain berkenaan tentang kepentingan nasional, Indonesia sebenarnya juga tidak menetapkan tujuan yang jelas yang akan dicapai dalam kerjasama ekonomi ini.

Diplomasi ekonomi yang diupayakan Indonesia dalam kerjasama ekonomi bilateral ini didasari oleh beberapa faktor seperti latar belakang sejarah, hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, dan juga kemajuan perekonomian Jepang. Indonesia juga bergantung kepada situasi

ekonomi Jepang karena kegiatan impor, ekspor, dan investasi yang berlangsung memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihat dari nilai perdagangan yang terus mengalami tren kenaikan. Meskipun menguntungkan, Indonesia harus terus bersikap tegas dalam melaksanakan perjanjian ini karena masih banyak kepentingan nasional dari kerjasama bilateral ini yang belum sepenuhnya tercapai. Melalui analisis komprehensif terhadap kendala yang tidak kondusif bagi Indonesia dalam tinjauan umum IJEPA. Indonesia akan melanjutkan upayanya untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya melalui kerja sama ini. Kerja sama ini diharapkan dapat terus meningkatkan hubungan baik perekonomian antara Indonesia-Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. A. (2020). DIPLOMASI EKONOMI JEPANG DALAM UPAYA PERPINDAHAN LIMBAH B3 MELALUI INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). *Jurnal PIR: Power in International Relations*, 3(2), 156-172.
- Ardiyanti, S. T. (2015). Dampak Perjanjian Perdagangan Indonesia - Jepang (Ijepa) Terhadap Kinerja Perdagangan Bilateral. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 9(2), 129–151.
<https://doi.org/10.30908/bilp.v9i2.5>
- Arifin Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus: Relasi Dagang Indonesia – Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA). *Indonesian Perspective*, 2(2), 105.
<https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18474>
- Fransiska Amadea. (2019). *Faktor Penghambat Peningkatan Investasi Jepang di Indonesia dalam Kerangka Kerja IJEPA 208-2018*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Gocklas C.S, L., & Sulasmiyati, S. (2017). Analisis Pengaruh Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Terhadap Nilai Perdagangan Indonesia-Jepang (Studi Pada Badan Pusat Statistik 2000-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)/Vol, 50(5)*, 191–200.
<https://media.neliti.com/media/publications/188892-ID-analisis-pengaruh-indonesia-japan-econom.pdf>
- Hadi, S. (2014). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement: an Indonesian Perspective. *East Asian Policy*, 06(03), 114–128.
<https://doi.org/10.1142/s1793930514000312>
- Harahap, I. K., & Esther, A. M. (2015). DAMPAK PENERAPAN INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TERHADAP EKSPOR INDONESIA KE JEPANG. *Media Ekonomi*, 23(1), 27.
<https://doi.org/10.25105/me.v23i1.3301>
- Kambey, E. S. (2016). KEGAGALAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). *Jurnal Lyceum*, 4(1), 430–439.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2015). *Analisis Review Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*

- dalam *Perdagangan Barang*.
<https://doi.org/10.1108/eb057810>
- Kartasasmata, K. (1977). *Administrasi Internasional*. Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Kerja sama Bilateral*, KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, diakses dari <https://kemlu.go.id/portal/id/read/125/view/kerja-sama-bilateral>
- Larasati, S. D., Susetianingsih, H., & Paramasatya, S. (2015). Dinamika Hubungan Indonesia dan Jepang Dalam Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Studi Kasus: Evaluasi Kebijakan Terhadap Eksploitasi Ikan Tuna Di Wilayah Perairan Indonesia. *Journal of International Relations*, 1(2), 70-78.
- Lestari, N. A. (2017). KERJA SAMA INDONESIA-JEPANG DALAM SEKTOR AGRIBISNIS (STUDI KASUS: EKSPOR KAKAO INDONESIA KE JEPANG). *JOM FISIP*, 4(2), 400.
- Ministry of Trade RI, D. G. I. T. (2007). Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement. *International Cooperation*, 1-5. http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=5
- Morgenthau, H. J., Thompson, K. W., & Clinton, W. D. (1985). Politics among nations: The struggle for power and peace.
- Nainggolan, O. R., & Pakpahan, S. *Kepentingan Indonesia Bekerjasama dengan Jepang dalam Bidang Pertahanan Tahun 2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Navari, C. (2016). Hans Morgenthau and the National Interest. *Ethics & International Affairs*, 30(1), 47-54. doi:10.1017/S089267941500060X
- Pratiwi, K. (2018). *Dampak Kerja sama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) Bagi Perekonomian Indonesia di Sektor Industri*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Pawestri, W. D. (2016). DIALEKTIKA PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL BERDASARKAN KONSTITUSI EKONOMI DENGAN BASIC PRINCIPLE DALAM BILATERAL INVESTMENT TREATIES. *Yuridika*, 31(1), 143-166.
- Sabaruddin, S. S. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69-90.
- Sandori, P. S. (n.d.). *KERUGIAN INDONESIA DALAM KERJA SAMA INDONESIA JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) Paskalia Sabtaliani Sandori 1* (Issue November 2004) [Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta]. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jsdk/article/download/2483/2116>
- Setiabudi, F. M. (2018). Upaya-upaya diplomasi ekonomi Jepang ke Indonesia melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam bidang tata kelola lingkungan.
- Setiawan, S. (2012). Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 17(2), 201-210.
- Vilio, M. (2018). *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*

- (IJEPA) dalam Meningkatkan Ekspor Indonesia ke Jepang tahun 2014 - 2017. Universitas Katolik Parahyangan Fakultas.
- Windiani, R. (2010). Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. Diakses dari <https://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/download/4894/4438>. Pada tanggal, 16 Juli 2020.
- Zulfira., R. D. (2019). DAMPAK HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN JEPANG SEBELUM DAN SESUDAH INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA). *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 2(1), 124–134.